

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM
KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) KOTA MAKASSAR**

MELIA WIDYA PRATIWI

P1300216005



SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

MANAJEMEN PERKOTAAN

MAKASSAR

2020



**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KOTAKU
(KOTA TANPA KUMUH) DI KOTA MAKASSAR**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Manajemen Perkotaan

Disusun dan diajukan oleh

MELIA WIDYA PRATIWI

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MELIA WIDYA PRATIWI
P1300216005

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal 12 Juni 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Shirwunas

Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA
Ketua

[Signature]
Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si
Anggota

Plt. Ketua Program Studi
Manajemen Perkotaan,

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,

[Signature]

Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, M.P

[Signature]
Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Melia Widya Pratiwi

Nomor Mahasiswa : P1300216005

Program Studi : Manajemen Perkotaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Sorong, 12 Juni 2020

Yang menyatakan



Melia Widya Pratiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
LEMBAR PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Lingkup dan Batasan.....	5
F. Sistematika Penulisan	6

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat	8
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	8
2. Tujuan Partisipasi Masyarakat.....	9

3. Manfaat Partisipasi Masyarakat.....	11
4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	12
5. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat.....	13
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	15
7. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	17
8. Derajat Partisipasi Masyarakat	18
B. Karakteristik Masyarakat Perkotaan	24
1. Pengertian Masyarakat Perkotaan	24
2. Struktur Masyarakat Perkotaan	26
C. Kebijakan Nasional.....	29
1. Nawacita.....	29
2. Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).....	31
D. Penelitian Terkait.....	57
E. Kerangka Konsep Penelitian	61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	62
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	62
1. Waktu Penelitian.....	62
2. Lokasi Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel	68
1. Populasi.....	68
2. Sampel	68
D. Metode Pengumpulan Data.....	69
E. Teknik Pengukuran Variabel dan Analisis Data.....	71
F. Sistem Operasional.....	78
G. Kerangka Penelitian	82



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
1. Gambaran Umum Kecamatan Makassar.....	83
2. Gambaran Umum Kelurahan Kecamatan Maccini Parang	86
3. Gambaran Umum Kawasan Deliniasi Kumuh.....	107
B. Karakteristik Responden	110
C. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Kotaku	114
1. Analisis Tingkat Partisipasi Pada Perencanaan Program Kotaku....	115
2. Analisis Tingkat Partisipasi Pada Pelaksanaan Program Kotaku	123
3. Analisis Tingkat Partisipasi Pada Pemanfaatan Hasil Program Kotaku	132
4. Analisis Tingkat Partisipasi Pada Evaluasi Program Kotaku	146
D. Analisis Hubungan Karakteristik Masyarakat Dengan Tingkat Partisipasi	156

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA.....	164
---------------------	-----

LAMPIRAN	166
----------------	-----



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terkait	57
Tabel 3.1	Skor tingkat partisipasi masyarakat	71
Tabel 3.2	Penilain skala Likert	72
Tabel 3.3	Koefisien tingkat korelasi variabel yang berpengaruh	73
Tabel 3.4	Variabel, Sub Variabel, Indikator, dan Pengukuran	74
Tabel 3.5	Matriks penelitian	80
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan Makassar Menurut Kelurahan	84
Tabel 4.2	Luas wilayah Kelurahan Maccini Parang	87
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk dirinci Menurut RW	89
Tabel 4.4	Jumlah Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga dirinci Menurut RW	90
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	90
Tabel 4.6	Keteraturan Bangunan Hunian di Kelurahan Maccini Parang..	93
Tabel 4.7	Kelayakan Bangunan Hunian di Kelurahan Maccini Parang...	96
Tabel 4.8	Kondisi jaringan jalan di Kelurahan Maccini Parang	98
Tabel 4.9	Kondisi drainase lingkungan di Kelurahan Maccini Parang	100
Tabel 4.10	Kondisi air bersih di Kelurahan Maccini Parang.....	101
Tabel 4.11	Pengelola limbah di Kelurahan Maccini Parang.....	102
Tabel 4.12	Kawasan Deleniasi Kumuh Kelurahan Maccini Parang	107
Tabel 4.13	Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin	111
Tabel 4.14	Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Usia	111
Tabel 4.15	Karakteristik Masyarakat Pekerjaan.....	112
Tabel 4.16	Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Lama Tinggal.....	112



Tabel 4.17 Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Penghasilan.....	113
Tabel 4.18 Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Pendidikan.....	114
Tabel 4.19 Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Status Masyarakat....	114
Tabel 4.20 Pengetahuan Masyarakat terhadap Program Kotaku	116
Tabel 4.21 Sumber informasi terkait Program Kotaku	117
Tabel 4.22 Intensitas Kehadiran Pada Rapat	119
Tabel 4.23 Masyarakat dalam Mengemukakan Pendapat.....	121
Tabel 4.24 Hasil Analisis tingkat partisipasi pada perencanaan Program Kotaku	123
Tabel 4.25 Peran masyarakat pada pelaksanaan program Kotaku	124
Tabel 4.26 Motivasi masyarakat pada pelaksanaan program Kotaku.....	126
Tabel 4.27 Tanggung jawab masyarakat pada pelaksanaan program Kotaku	128
Tabel 4.28 Keahlian masyarakat pada pelaksanaan program Kotaku	129
Tabel 4.29 Waktu partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program Kotaku	131
Tabel 4.30 Hasil Analisis tingkat partisipasi pada pelaksanaan Program Kotaku	132
Tabel 4.31 Pemanfaatan infrastruktur jalan	134
Tabel 4.32 Pemanfaatan infrastruktur drainase	136
Tabel 4.33 Pemanfaatan infrastruktur sanitasi/MCK.....	138
Tabel 4.34 Pemanfaatan jalur hijau/pergola	140
Tabel 4.35 Keikutsertaan masyarakat pada pemeliharaan infrastruktur ..	141
Tabel 4.36 Motivasi pemeliharaan masyarakat terhadap infrastruktur.....	143
Tabel 4.37 Pemeliharaan Infrastruktur.....	144
Tabel 4.38 Hasil Analisis tingkat partisipasi pada pemanfaatan hasil Program Kotaku.....	146
Tabel 4.39 Kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat.....	147



Tabel 4.40 Mengatasi permasalahan lingkungan	150
Tabel 4.41 Hasil Analisis tingkat partisipasi pada evaluasi Program Kotaku	150
Tabel 4.42 Hasil rekapitulasi analisis tingkat partisipasi masyarakat pada program Kotaku	151
Tabel 4.43 Uji Korelasi Karakteristik Terhadap Partisipasi Masyakat Pada Program Kotaku.....	157



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
	Gambar 2.1 Delapan tangga partisipasi masyarakat Arnstein	18
	Gambar 2.2 Tahapan kegiatan program Kotaku tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa.....	43
	Gambar 2.3 Struktur BKM/LKM	56
	Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian.....	60
	Gambar 3.1 Peta administrasi Kota Makassar.....	64
	Gambar 3.2 Peta administrasi Kecamatan Makassar	65
	Gambar 3.3 Peta administrasi Kelurahan Maccini Parang.....	66
	Gambar 3.4 Peta delniasi kumuh Kelurahan Maccini Parang.....	67
	Gambar 3.5 Kerangka Penelitian.....	82
	Gambar 4.1 Peta administrasi Kecamatan Makassar	85
	Gambar 4.2 Peta administrasi Kelurahan Maccini Parang.....	88
	Gambar 4 3 Kondisi Keteraturan Bangunan Kelurahan Maccini Parang.....	93
	Gambar 4 4 Kondisi Kepadatan Bangunan.....	94
	Gambar 4 5 Kondisi Kelayakan Bangunan Hunian	95
	Gambar 4 6 Kondisi Jalan Lingkungan di Kelurahan Maccini Parang	97
	Gambar 4 7 Kondisi Drainase Lingkungan di Kelurahan Maccini Parang	100
	Gambar 4 8 Kondisi Persampahan di Kelurahan Maccini Parang	103
	Gambar 4 9 Kondisi permukiman yang berdempetan berdampak resiko kebakaran yang tinggi di Kelurahan Maccini Parang	105
	4 10 Intensitas penggunaan lahan permukiman yang tinggi Permukiman,2018.....	106
	4 11 Peta deliniasi kumuh di Kelurahan Maccini Parang	108



Gambar 4.12 Pengerjaan rehab MCK dan reservoir.....	137
Gambar 4.13 Jalur hijau, pergola dan vertical garden pada kawasan deliniasi Kelurahan Maccini Parang.....	139
Gambar 4.14 Model Partisipasi Masyarakat Pada Program Kotaku	156





ABSTRAK

MELIA WIDYA PRATIWI. *Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Makassar* (dibimbing oleh Shirly Wunas dan Abdul Rachman Rasyid)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) bertujuan agar masyarakat berpartisipasi aktif dan bekerjasama dengan pemerintah kota untuk memecahkan masalah mendasar di wilayah permukiman kumuh perkotaan. Sasaran program ini adalah untuk mendukung pembentukan permukiman kota yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan (1) menggali tingkat partisipasi masyarakat dalam program Kotaku dan (2) menganalisis hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat partisipasinya. Penelitian *mixed-method* ini memilih Kelurahan Maccini Parang dalam Kota Makassar dengan pertimbangan kawasan permukiman kumuh yang berada di pusat kota. Sampel dari warga kelurahan ini dipilih secara *stratified random sampling* hingga menghasilkan 82 sampel, dan data tingkat partisipasi dikumpulkan dengan kuisisioner semi tertutup sebagai instrumen pengumpul data. Data diperkaya dengan melakukan *indepth-interview* dengan pemangku kepentingan yaitu tokoh masyarakat dan anggota tim teknis program Kotaku. Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan skala *Likert*, dan untuk menguji hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat partisipasinya dianalisis dengan uji korelasi *Pearson*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada program Kotaku ini masih berada pada tingkat konsultatif menurut teori Arnstein, dibuktikan oleh adanya peluang masyarakat yang sudah memiliki hak untuk berbicara dan mempunyai tanggung jawab, serta mengemukakan pendapat terkait persoalan lingkungan, sehingga masyarakat telah dianggap berpartisipasi, meski sebatas mengemukakan pendapat. Hubungan antara karakteristik masyarakat dengan tingkat partisipasi dipengaruhi oleh lama bermukim, yang berarti semakin lama seseorang tinggal di suatu tempat, semakin besar juga rasa memiliki dan perasaan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya. Dalam hal perbedaan status sosial terbukti tidak ada perbedaan dengan tingkat partisipasinya. Penelitian ini menyarankan agar partisipasi meningkat dalam memecahkan permukiman kumuh seyogyanya peran aktif dan partisipasi masyarakat secara penuh dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: *partisipasi masyarakat, permukiman kumuh, program Kotaku*



ABSTRACT

MELIA WIDYA PRATIWI. *The level of community participation on City Without Slum Program (Kotaku) in Makassar City* (supervised by Shirly Wunas and Abdul Rachman Rasyid)

The objective of this Kotaku Programs (City Without Slums) is to lead the community to participate and cooperative actively with the city government in solving some fundamental problems at the urban slums. This program supports the establisher of the habitable, productive and sustainable settlements.

The objectives of this study is (1) to determine the level of social participation in supporting the establishment of City Without Slum and (2) to analyze the relationship between the community characteristic and the level of community participation. This study is a kind of mixed method research and it sets the Maccini Parang in Makassar city by considering the slumless city which is located at city center. The research sample is the urban village inhabitant and whom selected by using stratified random sampling resulting 82 samples, and the data of level of participation was collected by using semi-closed questionnaire as an instrument for data collection. Data was developed by conducting in-depth interviews with stakeholders, namely community leaders and members of technical team of Kotaku Programs. The level of community participation was measured using a Likert scale, and to examine the relationship between community characteristics and the level of participation were analyzed by the Pearson correlation coefficient.

Research results that the level of social participation in the Kotaku Programs is at the consultative level according to Arnstein's theory, it is verified by existance of possibilities from society who already have the right to express, be able to responsible and express their own point of view regarding to enviromental problems, so as the society has been considered to participate, even if it is only express their own views. The relationship between community characteristics and the level of participation is influenced by the length of stay, which means the longer a person stays in a place, then the sense of belonging and feeling as part of their environment is bigger. In terms of differences in social status there is no difference in the level of participation. This research suggests that community participation in solving problems need to be increased regarding this kind of problem and the active role and participation community is fully needed so that the implementation of this program can work optimally.

ds: *community participation, Urban Slums, Kotaku programs*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, salah satunya ialah kota dan permukiman yang berkelanjutan. Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. (Hoelman dkk, 2016)

Melalui Kementerian PUPR pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program yang di laksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Program ini menjadi "*platform* kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan program Kotaku

meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman



perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan (Pedoman Umum Program Kotaku, 2016).

Dalam pelaksanaannya masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi aktif dan bekerja bersama dengan pemerintahan kelurahan/desa, antar pemerintah kelurahan/desa di bawah koordinasi pemerintah kecamatan dan kelompok peduli dalam penetaan lingkungan permukimannya. Nasdian (2014) mengemukakan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif warga komunitas sendiri yang dibimbing oleh cara berfikir komunitas itu sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses seperti halnya lembaga dan mekanisme sehingga dapat menegaskan kontrol secara efektif. Indikator partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar.

Kawasan permukiman kumuh Kelurahan Maccini Parang berada di sekitar kawasan pusat perkotaan Kota Makassar. Secara umum bercirikan kawasan padat penduduk, tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan sangat tinggi, minim daerah resapan dan ruang terbuka hijau. Oleh sebab itu kelurahan ini menjadi salah satu target pelaksanaan program Kotaku di Kota Makassar. Tipologi deleniasi kumuh kelurahan Maccini Parang masuk dalam kategori kumuh sedang di dataran rendah. (Dokumen RPLP Kelurahan Maccini 2018).



Keberhasilan suatu program Kotaku, khususnya di Kelurahan Maccini Parang tidak terlepas dari peran serta masyarakatnya, dikarenakan partisipasi dan kerja sama merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pembangunan. Konsep partisipasi menjadi suatu kajian penting dalam keberlangsungan dan keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin melihat aspek yang berpengaruh pada tahapan partisipasi masyarakat dan bagaimana perkembangannya di lokasi studi. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa memperlihatkan faktor pemicu keberhasilan dari partisipasi masyarakatnya. Faktor sisi potensial tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan jenis pendekatan partisipasi masyarakat ke depannya oleh tim teknis Kotaku apabila melakukan program di kelurahan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang dan masalah terhadap penelitian tersebut, maka rumusan-rumusan masalah yang diperoleh dari dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Maccini Parang pada program Kotaku Kota Makassar?

2. Bagaimana hubungan karakteristik masyarakat Kelurahan Maccini Parang dengan partisipasi pada program Kotaku Kota Makassar?



C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang dan masalah terhadap penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari dalam penelitian ini, ialah:

1. Menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Maccini Parang pada program Kotaku Kota Makassar
2. Menjelaskan hubungan karakteristik masyarakat Kelurahan Maccini Parang dengan partisipasi pada program Kotaku Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang didapat dari penelitian ini ialah dapat dikelompokkan ke dalam manfaat untuk akademis dan praktik. Manfaat-manfaat yang didapat di dalam tiap bidang tersebut ialah;

1. Manfaat akademik pada Prodi Manajemen Perkotaan, bahwa di dalam penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan menjadi tambahan kajian ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian ilmu dan menambah referensi yang berhubungan dengan manajemen perkotaan khususnya bagi peneliti lanjutan yang fokus mengkaji tentang tingkat partisipasi masyarakat.
2. Manfaat bagi pemerintah daerah, memberikan sumbangan pemikiran pada Pemerintah Kota Makassar sebagai bahan pertimbangan dan



rekomendasi terhadap program pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.

E. Lingkup dan Batasan

1. Lingkup Wilayah Studi

Lingkup wilayah studi difokuskan dikawasan deleniasi kumuh di Kelurahan Maccini Parang Kota Makassar, yang telah menerima program Kotaku semenjak tahun 2016 dan memiliki luas sebesar 1,33 Ha (Berdasarkan SK Walikota No. 050.05/1341/kep/ IX/2014) yang mencakup dua wilayah administrasi yaitu RT 002 - RW 001 dan RT 003 - RW 001).

2. Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dari penelitian ini mencakup pada tingkat partisipasi masyarakat pada program Kotaku dan hubungan antara karakteristik masyarakat dengan partisipasi pada program Kotaku.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang isi proposal ini, penulis menyajikan dalam bentuk sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pertama berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah studi dan materi serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bagian kedua menguraikan mengenai kajian teori dan materi yang berhubungan/memperkuat pengambilan keputusan/interpretasi dan identifikasi terhadap data dan analisa yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Bagian ketiga menjelaskan tentang jenis, waktu dan tempat penelitian, pendekatan yang digunakan, metode yang digunakan, teknik analisis dan definisi operasional.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bagian keempat, pembahasan mencakup gambaran umum lokasi penelitian, serta pemaparan hasil penelitian yang terdiri dari analisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yakni menggunakan teknik *scoring*. Selanjutnya menggunakan pendekatan tabulasi silang (*Crosstabulation*) dan dilakukan uji

Pearson.



BAB V Penutup

Bagian penutup ini memuat hasil kesimpulan dari penelitian dan juga saran-saran yang bisa diambil secara menyeluruh berkenaan dengan tingkat partisipasi masyarakat serta hubungan karakteristik masyarakat pada program Kotaku.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Istilah partisipasi adalah menjadi satu dari beberapa aspek-aspek yang memiliki peranan penting dalam mencapai keberhasilan dari program pembangunan yang diinginkan. Menurut penjelasan dari Nasdian (2014) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang inisiatif dan aktif yang ditempuh dan diarahkan oleh cara berfikir oleh komunitas yang terlibat di dalam pembangunan dengan memanfaatkan proses dan sarana berdasarkan pada mekanisme dan lembaga yang dapat menyakinkan dan menegaskan pengawasan yang efektif. Indikator dalam hal partisipasi tersebut ialah mempertimbangkan, mengambil tindakan dan kemudian menerapkan tindakan-tindakan yang diambil oleh komunitas tersebut sebagai salah satu peran yang memiliki kesadaran dalam mengambil peranan yang ditanggung. Adisasmita (2006) dalam Sahria (2018) juga mengemukakan bahwa definisi dari Partisipasi anggota masyarakat ialah keadaan terlibat dari tiap anggota masyarakat di dalam proses pembangunan yang mencakup aktivitas di

elaksanaan dan juga perencanaan sebuah program pembangunan
akukan oleh pihak yang terkait, khususnya masyarakat. Menurut



Isbandi (2007) dalam Sahria (2018) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran aktif dari masyarakat dalam proses pembahasan permasalahan dan juga potensi yang dimiliki oleh masyarakat, penyelidikan dan pengambilan keputusan mengenai beberapa solusi alternatif terhadap permasalahan yang ada untuk mengatasi beberapa permasalahan yang timbul.

2. Tujuan Partisipasi Masyarakat

Tujuan partisipasi berdasarkan Schiller dan Antolv (yang dikutip oleh Hetifah, 2003) dalam (Sahria, 2018) diklasifikasikan ke dalam beberapa tujuan.

a. Mewujudkan Visi bersama

Memformulasikan visi, misi dan tanggung jawab yang terkandung di dalam dasar-dasar tujuan suatu organisasi. Tujuan dari perwujudan visi bersama ialah untuk menjelaskan kebenaran namun lebih cenderung untuk merangsang timbulnya dialektika tentang bagaimana beberapa dasar sebuah organisasi terlaksana dengan baik.

b. Membangun Rencana

Pemformulasian visi bersama akan melahirkan orientasi yang ingin dicapai secara lebih spesifik. Tujuan tersebut menjadi acuan untuk tahap selanjutnya dalam proses pelaksanaan rencana-rencana yang dicanangkan.



c. Mengumpulkan Gagasan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara tertulis ataupun secara lisan. Tujuannya adalah menghimpun gagasan-gagasan dari semua pihak yang terlibat di dalam proses pembangunan.

d. Menentukan Prioritas/Membuat Pilihan

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengorganisasikan beragam ide yang timbul di dalam proses partisipasi dengan menggunakan metode kualitatif.

e. Menjaring Aspirasi/Masukan

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk melakukan pertukaran gagasan, informasi dan juga kepedulian yang berkaitan dengan sebuah rencana dan juga permasalahan antara pemerintah dengan masyarakat. Kegiatan ini adalah memungkinkan masyarakat untuk dapat berperan dalam menginterupsi rumusan kebijakan pemerintah, menyediakan pilihan desain yang dibutuhkan, dan juga pengelolaan pengimplementasian program.

f. Mengumpulkan Informasi/Analisis Situasi

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi potensi kekuatan dan peluang. Kegiatan ini juga mengoptimalkan ancaman dan kelemahan dalam menjalankan rumusan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul.



3. Manfaat Partisipasi Masyarakat

Di dalam pemerintahan demokratis, gagasan mengenai partisipasi masyarakat ini adalah satu dari beberapa gagasan yang signifikan, karena memiliki keterkaitan secara langsung dengan system pemerintahan yang berfokus terhadap keterlibatan masyarakat yang berperan sebagai pemilik penuh kedaulatan. Berdasarkan penjelasan dari (Thomsen,2003) yang dijadikan rujukan oleh (Nuring,2013) menguraikan dampak positif dari partisipasi masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Partisipasi masyarakat dapat mengembangkan dasar representatif dan juga pengetahuan.
- b. Partisipasi memungkinkan terciptanya hubungan-hubungan dari kekuasaan antar para *stakeholders* dan juga transparansi dalam hal komunikasi
- c. Partisipasi memungkinkan untuk mendekatkan perkembangan siklinal dan literatif yang menjamin bahwa pemecahan permasalahan didasari pada pengetahuan lokal dan pemahaman lokal.
- d. Partisipasi menggiatkan komitmen, akuntabilitas dan juga kepemilikan lokal. Keterlibatan masyarakat lojal memungkinkan terwujudnya hasil yang didapat secara berkelanjutan dengan cara memberikan rasa

iliki terhadap masyarakat mengenai proyek tersebut dan

astikan bahwa kegiatan-kegiatan yang menuju pada sifat yang



berkelanjutan agar tetap terjadi. Hasil yang didapat di dalam usaha-usaha kerjasama tersebut memiliki kemungkinan untuk juga dapat diterima oleh para stakeholders pembangunan kota yang berkelanjutan.

- e. Partisipasi memungkinkan untuk terbentuknya kemampuan masyarakat dan modal sosial. Pendekatan partisipasi ini juga memungkinkan berkembangnya pengetahuan bagi semua stakeholders yang terlibat berkenaan dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholders yang lainnya.

4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Makna sederhana dari partisipasi ialah sebagai bentuk keikutsertaan dari kelompok, seseorang dan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan. Makna tersebut bisa didefinisikan sebagai sumbangsih atau kontribusi dari seseorang, kelompok atau masyarakat yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan sebuah proyek atau program pembangunan. Secara umum, definisi partisipasi masyarakat dapat berupa bentuk nyata atau yang berbentuk fisik dan juga bentuk tidak nyata atau secara abstrak. Bentuk partisipasi yang nyata adalah dapat berwujud harta benda, uang, tenaga dan juga dalam bentuk keterampilan, sedangkan yang bentuk partisipasi yang tidak nyata ialah dapat berupa gagasan pemikiran, pengambilan keputusan,

partisipasi representative dan juga dapat berupa partisipasi sosial. Merupakan pendapat dari (Huraerah,2008) dalam (Nuring, 2013)



menjelaskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat bisa diklasifikasikan sebagaimana berikut ini

- a. Partisipasi yang berwujud hasil pemikiran dilakukan dalam hal pertemuan rapat;
- b. Partisipasi yang berbentuk tenaga dapat dilaksanakan di dalam beberapa aktivitas untuk proses pembangunan dan perbaikan desa, dan juga dapat berwujud dalam bentuk saling tolong menolong antar warga satu sama lain.
- c. Partisipasi yang berbentuk dalam hal harta benda adalah dengan dilaksankannya dalam bentuk pembangunan dan perbaikan desa, saling tolong menolong antar warga dalam bentuk makanan, uang dan lain sebagainya.
- d. Partisipasi dalam bentuk kemahiran dan keterampilan dapat berupa pelaksanaan beberapa bentuk usaha dan juga industry.
- e. Partisipasi dalam bentuk sosial dapat dilaksanakan dengan berjalannya paguyupan.

5. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat

Menurut *Department For International Development* (DFID) dalam panduan pendekatan partisipatif menurut Sumampouw,2004. Prinsip-prinsip partisipasi ialah dorongan-dorongan terhadap setiap warga dalam bentuk pemberian pendapat di dalam setiap proses pengambilan keputusan yang



berkenaan dengan kepentingan yang melibatkan masyarakat, baik itu secara tidak langsung ataupun secara langsung. Analisis partisipasi ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memahami harapan masyarakat secara umum mengenai masalah kemiskinan dan cara mengatasinya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang ada pada pengertian partisipasi masyarakat.

- a. Cakupan: tiap orang atau representasi dari berbagai kelompok yang mengalami dampak-dampak terhadap pelaksanaan keputusan dan juga proses dari proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Partnership Equal*): setiap orang mempunyai kemampuan, keterampilan dan juga inisiatif dan memfungsikannya keterlibatannya dalam semua proses pembahasan untuk membangun sebuah proyek tanpa menganggap struktur dan tingkat dari tiap-tiap pihak..
- c. Transparansi: tiap pihak harus mampu menggunakan dengan baik dari fungsi komunikasi. Komunikasi adalah keadaan yang kondusif dan juga terbuka untuk menghasilkan dialog yang sintesis.
- d. Pihak berwenang kesetaraan (*Power Sharing/Equal Powership*): beberapa pihak yang ikut berpartisipasi harus mampu menjalankan kekuasaan dan kewenangan secara seimbang untuk menghindari bentuk dominasi tertentu.

bertanggung jawab kesetaraan (*Responsibility*): beberapa pihak mempunyai kewenangan yang jelas di dalam tiap proses, hal ini terjadi karena adanya



pembagian kekuasaan atau kesetaraan otoritas, dan juga keikutsertaan di dalam setiap proses langkah-langkahnya dan juga di dalam setiap pengambilan keputusan terhadap pemberdayaan.

- f. Pemberdayaan: keikutsertaan oleh berbagai pihak memiliki keterikaran terhadap semua kelemahan dan kekuatan dari tiap masing-masing pihak yang terlibat, dengan ini keterlibatan aktif di dalam setiap proses mengalami aktivitas berkejasama dan juga saling dapat memberdayakan satu sama lainnya.
- g. Memerlukan kerjasama oleh pihak-pihak yang memiliki kemampuan sumber daya yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya untuk dapat bersinergi satu sama lainnya.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Di dalam kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat dalam menjalankan program yang hendak dilaksanakan, terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap berjalan tidaknya suatu program. Ross,1967 (dalam Jatmiko, 2017) menjelaskan bahwa terdapat factor yang memberikan pengaruh yang menghambat proses program dan juga factor yang dapat mendukung berhasilnya program. Berikut ini adalah factor-faktor kecenderungan tiap individu yang ikut berpartisipasi, yaitu:



a. Usia

Faktor usia merupakan factor yang dapat mempengaruhi sikap dari seseorang terhadap aktivitas yang ada di masyarakat. Seseorang dengan kelompok usia menengah memiliki kestabilan terhadap norma-norma dan nilai-nilai, dan akan cenderung lebih bersedia untuk ikut berpartisipasi di dalam proses pelaksanaan dibandingkan dengan kelompok seseorang dengan usia yang berbeda.

b. Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dalam pandangannya terhadap keikutsertaannya di dalam proses pelaksanaan pembangunan proyek. Wanita cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya dalam mengurus urusan rumah tangganya, dibandingkan dengan laki-laki akan memiliki kecenderungan untuk terlibat aktif di dalam kegiatan pembangunan.

c. Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai syarat mutlak yang dimiliki oleh seseorang untuk berpartisipasi. Pendidikan mempengaruhi sikap dari seorang individu terhadap lingkungannya, sikap yang dibutuhkan untuk mengembangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan Penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan memiliki keterkaitan terhadap seseorang yang mendorong untuk ikut juga dalam partisipasi di dalam kegiatan yang ada



di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi seseorang memiliki pengaruh terhadap partisipasi di dalam masyarakat.

e. Lama Tinggal

Durasi waktu seseorang yang tinggal di dalam suatu lingkungan tertentu akan memberikan pengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam kegiatan masyarakat.

7. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff, 1977 dikutip dalam (Rizal, 2014) mengklasifikasi persepsi ke dalam beberapa tahapan, yaitu partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi di dalam pelaksanaan, partisipasi di dalam memperoleh manfaat yang didapatkan dan partisipasi di dalam tahapan evaluasi. Berikut ini adalah uraian dari tiap tahapan:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan dan juga kebijakan suatu organisasi. Partisipasi di dalam tahapan ini adalah berupa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk juga dapat menyalurkan dan mengekspresikan aspirasinya untuk meninjau suatu program atau rencana yang hendak ditetapkan. Masyarakat juga dimungkinkan untuk meninjau setiap kebijaksanaan atau keputusan yang sedang berlangsung. Partisipasi di

di dalam proses pengambilan keputusan ialah tahapan proses pembangunan



yang mempertimbangkan pada prioritas yang dtuangkan dan terpilih dalam bentuk program yang didasarkan pada kepentingan dari masyarakat.

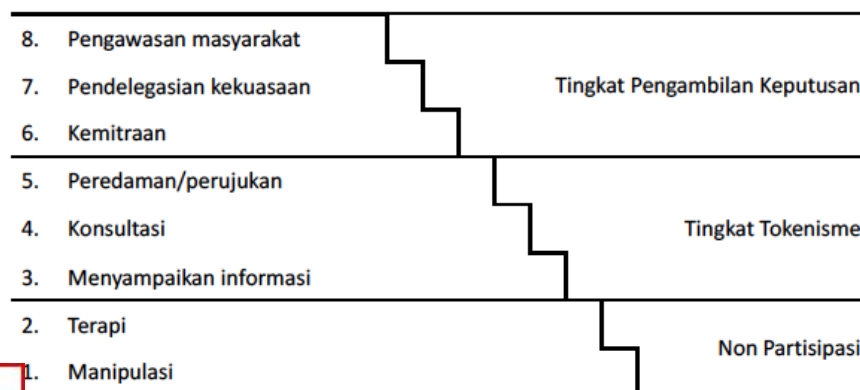
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan ialah keikutsertaan dan partisipasi masyarakat di dalam aktivitas pengoperasioinalan pembangunan yang didasarkan pada program yang telah ditentukan. Di dalam penerapan program pembangunan, bentuk partisipasi dari masyarakat dapat berupa tingkat keaktifan masyarakatnya dalam ikut berpartisipasi, baik itu berupa uang, tenaga, bahan, entah itu secara tidak langsung atau secara langsung secara berkelanjutan.
3. Partisipasi di dalam memperoleh manfaat yang didapatkan adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mendapatkan dan menikmati hasil-hasil dari pembangunan yang telah dicapai.
4. Partisipasi di dalam tahapan evaluasi ialah bentuk keikutsertaan dari masyarakat di dalam hal mengawasi dan menilai aktivitas dari pembangunan dan juga hasil-hasilnya. Penilaian ini dilaksanakan secara langsung dengan cara ikut berperan dalam mengawasi dan menilai, seperti memberikan kritikan, saran dan juga complain terhadap aktivitas pembangunan tersebut.

8. Derajat Partisipasi Masyarakat

alam setiap kegiatan partisipasi, terdapat tingkatan atau derajat yang berbeda-beda. Tingkatan dan derajat tersebut diperbandingkan satu sama



lainnya, yang mana yang akan membentuk sebuah garis yang berada pada titik non partisipasi sampai dengan partisipasi yang berperan secara penuh. Dalam mengidentifikasi proses mana yang mana yang disebut dengan partisipasi dan juga non partisipasi masyarakat, penelitian ini memanfaatkan konsep partisipasi (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) oleh Arnstein. Di dalam konsep delapan tangga oleh Arnstein ini mengidentifikasi partisipasi dari masyarakat yang berdasarkan pada kekuatan masyarakat dalam memutuskan suatu produk akhir, tiap memiliki perbedaan yang didasarkan pada korespondensi perluasan kekuatan masyarakat di dalam menentukan rencana atau program. Menurut (Arnstein,1969) dalam (Asjhari, 2013) secara umum menjelaskan bahwa di dalam model ini terdapat tiga tingkatan derajat dari partisipasi masyarakat. Pertama, *Non Participation* atau tidak berpartisipasi, kedua *Degrees of Tokenism* atau derajat semu dan yang ketiga adalah *Degrees of Citizen Powers* atau derajat kekuatan masyarakat.



Gambar 2.1 Delapan tangga partisipasi masyarakat Arnstein
 Sumber: Ashjari, 2013



- a. Manipulasi (*Manipulation*). Pada tingkat manipulasi ini masyarakat dianggap sebagai makhluk yang tidak berdaya kemudian masyarakat yang berkuasa memanipulasi dengan memasukan masyarakat lain yang tidak memiliki daya ke dalam program-program yang pada dasarnya belum tentu koheren dengan keadaan yang ada. Masyarakat yang didefinisikan sebagai masyarakat yang tidak berdaya ialah masyarakat miskin. Contohnya, masyarakat di undang kemudian didudukan bersama mengikuti seluruh program dengan asumsi bahwa memang kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan, seolah-olah memang itu suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat miskin. Padahal, itu hanya manipulasi saja untuk memenuhi formalitas dalam sebuah program atau rencana. Asumsinya, dengan mengikuti semua perintah-perintah yang telah dikemukakan oleh masyarakat maka dianggap sudah berpartisipasi. Maka di dalam tingkatan pada tahapan ini dianggap sebagai *non – partisipasi* atau partisipasi yang rendah.
- b. Terapi (*Therapy*). Dalam melaksanakan rencana program, masyarakat memiliki peranana yang penting dan juga ikut dilibatkan mulai tahap perencanaan. Pada awalnya pendapat masyarakat diterima akan tetapi kemudian tidak dijalankan. Keikutsertaan masyarakat ini yang kemudian

but dengan partisipasi ialah membantu masyarakat menjalankan apa
g kemudian sudah menjadi tujuan penguasa. Masyarakat dilibatkan



bukan untuk berpartisipasi menyubangkan ide, akan tetapi sebenarnya hanya diperlukan bantuan saja, dan masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwasanya masyarakat tersebut hanya untuk diperalat. Oleh karena itu, pada tahapan ini, tingkatan derajatnya dipertimbangkan sebagai *non-partisipasi* atau partisipasi rendah.

- c. Pemberitahuan (*informing*). Pada tahap pemberitahuan dapat dikatakan suatu transisi antara yang berpartisipasi dengan non-partisipasi, artinya bahwa dalam tingkatan tersebut, pemberitahuan masyarakat telah mulai melibatkan masyarakat untuk ikut serta. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berpartisipasi penuh yang terlibat menjalankan kekuasaan sosialisasi yang searah. Artinya bahwa masyarakat yang berpartisipasi penuh memang memberikan informasi bahwasanya semua orang berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan, mempunyai hak-hak sebagai warga negara, tanggung jawab akan tetapi, masyarakat hanya sekedar menginformasikan atau memberitahukan saja tidak ada saluran timbal balik atau umpan balik dari masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dengan yang memiliki kekuasaan. Artinya bahwa tidak terdapat suatu negosiasi. Yang paling sering digunakan dalam komunikasi satu arah seperti media, poster ataupun tanggapan terhadap suatu pertanyaan-

anyaan. Rapat juga menjadi suatu kendaraan komunikasi satu arah dengan memberikan suatu informasi yang sederhana dan kemudian



menyediakan informasi-informasi yang tidak keterkaitan, diinformasikan ke semua masyarakat yang terlibat baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka tingkatan dalam tahap ini masih dipertimbangkan dalam tahapan berpartisipasi sedang atau *tokenisme*.

- d. Konsultasi (*consultation*). Disini masyarakat sudah sadar maka memiliki hak untuk berbicara, memiliki rasa tanggung jawab dan mengutarakan pendapat-pendapat. Setidaknya sudah mulai dilakukan komunikasi dua arah yaitu adanya umpan balik antara kedua belah pihak. Namun meskipun sudah terjadi *feedback* oleh kedua arah, belum sepenuhnya tepat karena tidak ada jaminan pendapat yang dikemukakan tersebut dipertimbangkan dan didengarkan. Biasanya konsultasi ini dalam melakukan survey-survey tentang masyarakat setempat. Dalam tahap ini masyarakat dianggap sebagai abstraksi statistik, kemudian partisipasi yang ada diukur dengan berapa banyak orang yang menghadiri suatu pertemuan, mengisi ataupun menjawab kuesioner survey, pencapaian ini kemudian yang dianggap berpartisipasi. Tingkat partisipasi dalam tahapan ini hanya bersifat sebagai penyesuaian pendapat dan harapan agar segalanya dapat disetujui. Maka tingkatan di dalam tahapan ini masih dipertimbangkan sebagai kondisi yang sedang atau *tokenisme*.

entraman (*Placation*). Dalam tingkatan tersebut masyarakat diberikan sa untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan



masukannya. Akan tetapi jumlahnya pemegang kuasa masih dominan daripada masyarakat yang ikut berpartisipasi alhasil saran dan pendapatnya diterima agar mendapat legitimasi akan tetapi belum tentu juga diterima dan dilaksanakan. Dalam tingkatan partisipasi masyarakat partisipasi *tokenisme* (justifikasi)/sedang.

f. Kemitraan (*Partnership*). Pada tingkat kemitraan, kekuatan tersedia disalurkan melalui pertimbangan-pertimbangan antara masyarakat dengan penguasa sebagai pemegang kekuasaan. Dalam tahap ini, akan menimbulkan kesepakatan-kesepakatan, bahwa kedua belah pihak yaitu masyarakat dan penguasa saling membagi peranan-peranan dimulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan untuk pengambilan keputusan-keputusan. Dengan demikian tahap partisipasi dapat dinyatakan bahwa kekuatan sudah berada di bawah kekuasaan masyarakat. Dapat dikatakan partisipasi masyarakat tinggi.

g. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*). Pada tingkatan pendelegasian kekuasaan ini, masyarakat mulai memainkan peranan yang penting terhadap kekuasaan untuk menentukan program-program. Bahkan masyarakat diberikan kekuasaan hampir menyeluruh. Tingkatan partisipasi berada di tangan masyarakat, masyarakat yang memiliki

kuasaan dalam berjalannya program yang direncanakan. Artinya masyarakat memegang kartu yang signifikan dalam menjamin



akuntabilitas suatu kebijakan. kemudian untuk menyelesaikan suatu perbedaan atau permasalahan, pemegang kekuasaan ini harus melalui proses perundingan daripada menanggapi tekanan-tekanan yang kemudian muncul. Tingkatan partisipasi tinggi karena kekuatan ada di warga negara.

- h. Pengawasan Masyarakat (*citizen control*). Pada tingkatan Pengawasan Masyarakat ini tingkat dari keikutsertaan masyarakat berada dalam tingkatan yang penuh, artinya bahwa semua program telah melibatkan masyarakat secara penuh. Partisipasi dari masyarakat dalam tingkatan ini, disebut dengan istilah tingkatan partisipasi yang sempurna yaitu partisipasi yang secara penuh dikuasakan kepada masyarakat, masyarakat memiliki kendali penuh atas program atau kebijakan yang ada, masyarakat berwenang memutuskan, melaksanakan dan mengawasi. Berjalannya program sudah wewenang dari masyarakat dan masyarakat yang mengendalikan semuanya, artinya partisipasi dalam tangga ini adalah partisipasi tinggi.

B. Karakteristik Masyarakat Perkotaan

1. Pengertian Masyarakat Perkotaan

Masyarakat perkotaan menurut pemahaman oleh masyarakat pedesaan kan dengan lingkungan masyarakat yang penuh dengan kemewahan, stik, individual dan penuh dengan banyaknya gedung-gedung yang



megah dan mewah. Asumsi mengenai istilah perkotaan tentunya memiliki perbedaan dibandingkan dengan keadaan di dalam masyarakat pedesaan, namun faktanya bahwa di dalam masyarakat perkotaan juga banyak terdapat para pekerja-pekerja yang juga berkerja di sektor informal, contohnya ialah seperti pekerja-pekerja yang berkerja sebagai tukang sapu, tukang becak, pemulung sampai bahkan pengemis. Jika ditinjau lebih mendalam, maka juga banyak ditemukan lingkungan perkampungan yang kumuh atau dikatakan sebagai lingkungan yang tidak layak untuk dihuni, Talcot Parsons (1937) di dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Social Action* menjelaskan beberapa ciri-ciri masyarakat perkotaan, diantaranya adalah:

a. Netral Efektif

Masyarakat perkotaan lebih cenderung memiliki sifat yang rasional, sifat rasional tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep yang berhubungan berdasarkan pada ikatan impersonal (*Gesellschaft*). Masyarakat perkotaan ini cenderung tidak melibatkan hal-hal yang bersifat emosional, maka oleh sebab itu, tipe masyarakat perkotaan disebut dengan istilah netral di dalam ikatan perasaan antar satu sama lain.

b. Orientasi Diri

Masyarakat perkotaan cenderung tidak mementingkan sifat pertunangan atau kekerabatan yang erat terhadap orang lain, karena pada masyarakat perkotaan ini memiliki sikap mandiri dan apatis terhadap



orang lain, dan terbiasa bertahan hidup di lingkungan yang sifatnya individualis.

c. Universalisme

Sifat pemikiran rasional yang ada pada masyarakat perkotaan adalah dasar yang signifikan terhadap universalisme atau penerapan norma dan nilai secara umum.

d. Prestasi

Prestasi dan mutu dari seseorang tertentu menyebabkan orang tersebut dapat diterima sesuai dengan keahlian dan kepandaiannya.

e. Heterogenitas

Masyarakat perkotaan memiliki kecenderungan yang memahami konsep heterogen yang terdiri dari banyak susunan dan komponen masyarakat.

2. Struktur Masyarakat Perkotaan

a. Segi Demografi

Di kota-kota besar banyak dijumpai ekspresi demografi. Perkotaan memiliki daya tarik bagi penduduk perdesaan untuk menjadikan tempat sebagai tempat untuk mencari kehidupan yang lebih layak, karena di perkotaan banyak dijumpai pusat pemerintahan, pusat jasa dan juga pusat perdagangan.

an jenis kelamin pada masyarakat perkotaan memiliki peranan yang n, karena banyak kehidupan social di perkotaan dipengaruhi oleh



perbandingan dan proporsi jenis kelamin. Lingkungan perkotaan memiliki proporsi dan perbandingan jenis kelamin wanita yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin pria. Struktur penduduk kota banyak dijumpai dengan struktur umur yang produktif, sedangkan struktur penduduk yang tidak produktif yang berusia di atas 65 tahun sudah banyak yang pensiun dan memilih untuk hidup di tempat yang lebih tenang suasananya, khususnya di daerah sub-urban dan daerah pedesaan.

b. Segi Ekonomi

Struktur kota dari segi ekonomi bisa ditinjau berdasarkan pada perbedaan jenis pekerjaan dari warga dan penduduk kota. Penduduk perkotaan lebih banyak berkerja pada sektor non-agraris, seperti kepegawaian, perdagangan dan bidang jasa yang lainnya. Oleh karena itu, struktur kota dari segi ekonomi menyesuaikan berdasarkan pada fungsi dan bidang yang ada pada suatu kota. Jenis pekerjaan yang ada pada masyarakat perkotaan menjadi akan lebih berkembang dan terspesialisasi seperti ketua, pemimpin dan manajer dari sebuah perusahaan.

c. Segi Segregasi

Pengertian segregasi dianalogikan dengan istilah pemisahan yang menyebabkan kepada pembagian pada beberapa kelompok, oleh karena itu

ering dijumpai dengan adanya kompleks perumahan untuk tentara, s perumahan untuk para pegawai bank, kompleks perumahan dari



para pecinan, pertokoan dan lain sebagainya. Segregasi tersebut terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan pekerjaan, suku, strata sosial, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Sementara itu, segregasi pada mata pencaharian bisa ditinjau berdasarkan pada adanya kompleks perumahan buruh, pegawai, pedagang, industriawan, dan lain sebagainya, sedangkan segregasi terhadap perbedaan strata sosial bisa diidentifikasi dengan terdapatnya kompleks perumahan untuk masyarakat ekonomi atas. Di dalam kependudukan masyarakat perkotaan terdapat beberapa jenis kesenangan dan subkultur. Perilaku, bahasa dan penduduk di perkotaan juga lebih beragam dibandingkan dengan yang ada di pedesaan.

Dengan adanya daya tarik terhadap pendidikan, komunikasi, transportasi dan juga mata pencaharian, maka kota dapat menimbulkan terjadinya ketertarikan oleh masyarakat penduduk pedesaan untuk mengadu nasib di kota. Segregasi tidak akan menyebabkan berbagai permasalahan jika dari semua masyarakat yang ada pada masyarakat perkotaan saling dapat bertoleransi, saling pengertian antar satu pihak dengan pihak yang lainnya. Segregasi digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu jenis segregasi sengaja dan juga segregasi tidak sengaja. Segregasi sengaja timbul karena terjadinya perencanaan kota, seperti kompleks pasar, bank dan lain sebagainya,

dan jenis segregasi tidak langsung timbul karena tanpa adanya perencanaan kota, namun terjadi karena terjadinya arus masuk penduduk dari



pedesaan menuju ke perkotaan. Akibat dari terjadinya segregasi tidak langsung menyebabkan terjadinya keadaan *slums* atau keadaan suatu daerah yang menjadi tidak teratur, bangunan untuk tempat tinggal menjadi tidak tertata dan tidak memenuhi standar layak hidup dan kesehatan. Terjadinya segregasi juga dapat terjadi karena tingginya harga tanah dan sewa tanah yang berbeda dari suatu tempat tertentu ke tempat yang lainnya. Warga perkotaan yang memiliki keadaan ekonomi yang baik akan cenderung lebih banyak tinggal di daerah yang nyaman dan mahal harganya, dan begitu pula sebaliknya.

C. Kebijakan Nasional

1. Nawacita

Istilah Nawacita ialah terminology yang berasal dari bahasa Sanskerta, Istilah Nawa memiliki makna Sembilan, sedangkan Cita maknanya adalah keinginan, agenda atau harapan. Program Nawacita ini dilaksanakan untuk memperjelas prioritas perubahan untuk Indonesia menjadi mandiri dalam bidang perekonomian, kebudayaan dan memiliki kedaulatan politik. Berikut ini adalah inti program Nawacita berdasarkan uraian oleh Kemendikbud, 2017, diantaranya adalah:

a. Menghidupkan ulang eksistensi Negara untuk menghadirkan rasa aman

melindungi bagi seluruh warga Negara, melalui keamanan nasional yang terpercaya, politik bebas aktif, dan pembangunan pertahanan Negara



yang berdasarkan pada kepentingan Negara dan memperkuat jati diri bangsa

- b. Mendorong pemerintah untuk turut serta secara aktif dengan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, terpercaya dan demokratis, dengan menyediakan prioritas terhadap upaya-upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap semua institusi demokrasi dengan melaksanakan konsolidasi demokrasi melalui reformasi system pemilu, lembaga perwakilan dan kepartian.
- c. Memperkuat daerah-daerah dan desa untuk membangun Indonesia menjadi kerangka Negara kesatuan.
- d. Berusaha menjadi Negara yang kuat dengan melaksanakan reformasi penegakan hukum dan system yang bermartabat, terpercaya dan bebas korupsi.
- e. Memperbaiki mutu hidup rakyat Indonesia dengan cara meningkatkan literasi pendidikan, program pelatihan dan mengembangkan kesejahteraan.
- f. Mengembangkan produktivitas dan kapasitas rakyat di pasar internasional, dengan hal ini maka Indonesia bisa bangkit dan maju dibandingkan dengan Negara-negara asia yang lainnya.

ciptakan kemandirian dalam bidang ekonomi dengan melibatkan
or-sektor industry dan ekonomi lokal.



- h. Merubah karakteristik Negara dengan melakukan kebijakan memperbaiki pedagogi dan kurikulum pendidikan nasional dengan cara mengembangkan aspek pendidikan bangsa meliputi pendidikan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, akan cinta terhadap bangsa dan juga budi pekerti.
- i. Memperkuat restorasi sosial Indonesia dan kebhinekaan yang meliputi kebijakan dalam mengembangkan ruang-ruang dialog antar warga Negara dan juga kebijakan untuk memperbaiki pendidikan akan kebhinekaan.

2. Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

a. Latar Belakang Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Rencana untuk pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 yang diatur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 memberikan amanah terhadap pengembangan dan pembangunan terhadap pada kawasan di perkotaan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan mutu lingkungan permukiman yang kumuh menjadi lebih baik, mencegah terjadinya tempat permukiman yang kumuh untuk timbul dan juga untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan.

Terdapat luas tanah yang digolongkan di dalam permukiman perkotaan yang kumuh sekitar 35.291 Ha tanah pada tahun 2016 yang berdasarkan

hasil dari perhitungan pengurangan luas permukiman perkotaan kumuh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi



permukiman perkotaan yang kumuh tersebut akan mengalami jumlah peningkatan jika tidak dilakukan penanganan yang tepat sasaran, inovatif dan bersifat menyeluruh.

Masalah berkenaan dengan permukiman perkotaan yang kumuh masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten/kota karena masalah tersebut menjadi salah satu dari beberapa aspek dari pembangunan perekonomian yang ada di kota. Berkenaan dengan skala pencapaian dan sifat pekerjaan yang sangat rumit tersebut, maka penyinergian kerjasama dari beberapa pihak yang terkait baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan di tingkat kelurahan/desa, pihak masyarakat, pihak swasta dan pihak-pihak yang terkait lainnya sangat diperlukan.

Keterlibatan dari beberapa pihak secara kooperatif tersebut diharapkan dapat menyebabkan berbagai dampak-dampak yang positif, diantaranya adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan juga rasa bertanggung jawab dari masyarakat untuk ikut memelihara hasil dari proses pembangunan, meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak swasta dan masyarakat terhadap keseriusan pembangunan oleh pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam

meningkatkan terciptanya permukiman perkotaan yang lebih layak untuk dihuni.

Untuk menjamin terciptanya pembangunan tersebut pemerintah, maka



Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan inisiatif untuk berkolarasi dalam menyelenggarakan Program Kota tanpa Kumuh atau KOTAKU.

Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh ini mensyaratkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki peranan yang penting dalam menyelenggarakan permukiman yang layak huni dengan cara menggiatkan kembali peranan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Rancangan program ini berlandaskan pada penerapan pengembangan terhadap program-program nasional yang sebelumnya pernah dilaksanakan. program-program nasional tersebut sudah menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang penting dalam mengembangkan program KOTAKU dan juga terbentuknya kelembagaan di tingkat masyarakat, kolabatif antara pemerintah daerah dengan masyarakat, system pengawasan dan juga kapabilitas dari tim pendamping.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di atas tersebut, program KOTAKU disusun secara kolektif dengan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan terciptanya permukiman yang menjadi layak huni, di antaranya adalah:

- 1) Peningkatan kapabilitas di dalam pelaksanaan dan perencanaan terhadap pelaksanaan program penataan permukiman yang kumuh di tingkatan

upaten/kota karena peranan dari pemerintah daerah sangat mendesak



di dalam penyediaan pelayanan dan infrastruktur di tingkatan kabupaten/kota.

- 2) Pelaksanaan rencana terhadap penanganan masalah permukiman yang kumuh di tingkat kota merupakan rencana investasi pembiayaan dari beberapa sumber (masyarakat, swasta, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan lain sebagainya)
- 3) Pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrastruktur pada tingkatan kota (primer atau sekunder) yang berkaitan secara langsung terhadap permasalahan berkenaan dengan permukiman yang kumuh.
- 4) Ketersediaan terhadap bantuan yang bersifat teknik tersebut memperkuat system pengawasan dan informasi terhadap penanganan mengenai permasalahan permukiman yang kumuh, meninjau ulang alternative pilihan di dalam penyelesaian masalah lahan dan tanah dan lain sebagainya

b. Pengertian Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Perencanaan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah program-program rencana yang diimplementasikan secara nasional menjadi kebutuhan yang mendesak, atau dasar terhadap penanganan kumuh yang menyinergikan beberapa sumber pendanaan dan juga sumber daya, baik dari

kat, pihak swasta, pemerintah kota/kabupaten, provinsi, pusat dan beberapa pemangku kepentingan yang lainnya juga. Tujuan dari



Perencanaan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ialah untuk membentuk dan membangun system yang secara kolaboratif menangani masalah permukiman yang kumuh, dengan melibatkan pemerintah daerah yang berperan sebagai pemimpin dan berkerja sama dengan para pemangku kepentingan baik dalam hal pengimplementasian dan juga perencanaan. Perencanaan penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut dapat menjadi panggung kolaborasi dalam mendukung dan menyelenggarakan penanganan terhadap permukiman yang kumuh sekitar seluar 38.431 Ha yang dilaksanakan secara berangsur-angsur melalui peningkatan kapabilitas masyarakat dan pemerintah daerah, pengembangan pelayanan dasar dan infrastruktur pada tingkatan kota ataupun masyarakat, perencanaan, penguatan kelembagaan, dan juga pendampingan teknis untuk mendukung terpenuhinya RPJMN 2015-2019, ialah menciptakan kota tanpa kumuh.

Berkenaan dengan Perumahan dan Kawasan permukiman yang termaktub di dalam UU No 1 Tahun 2011 menjelaskan bahwa permukiman yang kumuh ialah wilayah permukiman yang tidak layak untuk dihuni yang disebabkan oleh tingkat kepadatan, ketidakberaturan, kualitas, infrakstruktur bangunan yang tidak sesuai berdasarkan pada syarat-syarat bangunan yang

mentara itu Perumahan Kumuh ialah perumahan-perumahan yang kualitas fungsi yang tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal.



Berdasarkan uraian definisi yang telah dijelaskan di atas tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa karakteristik-karakteristik dari permukiman yang kumuh dan perumahan kumuh yang berdasarkan terhadap aspek-aspek fisik sebagaimana berikut ini:

- 1) Merupakan satuan entitas permukiman dan perumahan;
- 2) Kondisi infrastruktur bangunan yang tidak melengkapi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan tidak teratur;
- 3) Keadaan fisik sarana dan prasarana tidak sesuai dengan syarat sarana dan prasarana. Khusus untuk bidang batasan sarana prasarana dan keciptakaryaannya, ialah sebagaimana berikut ini:
 - a) Jalan akses yang ada pada lingkungan tersebut;
 - b) Drainase yang ada di dalam lingkungan tersebut;
 - c) ketersediaan air minum dan air bersih di lingkungan tersebut;
 - d) Pengelolaan terhadap sampah-sampah yang dihasilkan;
 - e) Pengelolaan terhadap air limbah;
 - f) Pengamanan terhadap terjadinya kebakaran dan;
 - g) Ruang terbuka publik.

Karakteristik-karakteristik fisik tersebut dijadikan sebagai dasar terhadap perumusan indikator dan kriteria terhadap gejala-gejala kumuh di dalam pengidentifikasian lokasi permukiman dan perumahan yang kumuh.

Selain itu, karakteristik-karakteristik non fisik yang perlu diidentifikasi



diantaranya adalah kepastian berusaha, kepastian bermukim, perilaku masyarakat, dan juga lain sebagainya.

c. Tujuan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kota tanpa Kumuh ialah untuk mengembangkan akses-akses pelayanan dasar dan infrastruktur terhadap permukiman kumuh di perkotaan untuk menyelenggarakan terwujudnya sebuah cita-cita permukiman perkotaan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal, yang produktif dan juga berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan perencanaan program Kota tanpa Kumuh dapat terwujud dengan:

- 1) Semakin sempitnya permukaan yang kumuh
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) pada tingkat kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan mengenai perumahan dan permukaan yang kumuh berfungsi dengan tepat;
- 3) Terbentuknya rancangan-rancangan mengenai penanganan dan penyelesaian masalah tentang perumahan dan permukiman yang kumuh pada tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang tersusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4) Semakin berkembangnya jumlah penghasilan yang diperoleh oleh

masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan ketersediaan kegiatan



dan infrastruktur peningkatan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kualitas dan mutu kawasan permukiman yang kumuh;

- 5) Terimplementasikannya aturan-aturan secara kolektif sebagai bentuk upaya terhadap perubahan perilaku gaya hidup yang sehat dan bersih dari masyarakat

Indikator terwujudnya program dan tujuan pengembangan peningkatan perkotaan tanpa kumuh yaitu berdasarkan pada pengentasan atau penyelesaian permukiman yang kumuh di perkotaan dan diatur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Berikut ini adalah indikator-indikator yang harus terpenuhi;

- 1) Semakin berkembangnya akses masyarakat terhadap pelayanan dan infrastruktur perkotaan pada kawasan yang tidak bersih berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan, diantaranya adalah air bersih/minum; pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, drainase, pengelolaan air limbah dan tata ruang public.
- 2) Semakin berkurangnya kawasan yang kumuh dan terciptanya akses pelayanan perkotaan dan infrastruktur yang lebih baik.
- 3) Berfungsi dan terbentuknya kelembagaan seperti POKJA PKP untuk mendukung terwujudnya program KOTAKU pada tingkat kota/kabupaten.



- 4) Pengguna terhadap manfaat yang ditimbulkan merasa senang dan puas terhadap peningkatan mutu kualitas pelayanan perkotaan dan infrastruktur pada kawasan yang kumuh.
- 5) Semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan pada masyarakat dengan mendukung kehidupan yang terus menerus terhadap wilayah kumuh tersebut

d. Strategi dan Prinsip Dasar Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

1) Strategi Dasar

Strategi dasar terhadap terselenggaraan program ialah adanya kerjasama seluruh pihak yang berperan dalam pembangunan pada penanganan permukiman.

2) Strategi Operasional

Strategi operasional terhadap terselenggaraan program ialah sebagaimana berikut ini:

- a) Melaksanakan terselenggaranya penanganan terhadap permukiman yang kumuh dengan cara mencegah perilaku yang dapat membuat kumuh dan juga meningkatkan mutu kualitas dari permukiman yang kumuh.
- b) Mengembangkan kapabilitas kelembagaan yang dapat membangun dan berkolaborasi jaringan penanganan terhadap permukiman yang kumuh pada tingkat masyarakat sampai pada tingkat pemerintah pusat.



- c) Mengimplementasikan program perencanaan yang partisipatif dan juga penganggaran yang melibatkan multi actor dan multi sektor
- d) Menyakinkan dilibatkannya pada agenda RPJM Daeran dan juga perencanaan formal dengan terselenggarakannya rencana penanganan permukiman yang kumuh.
- e) Berkolaborasi di dalam rencana dan memanfaatkan produk data, termasuk juga dalam kesepakatan data dasar atau baseline permukiman yang dijadikan sebagai tujuan bersama di dalam pengendalian dan perencanaan
- f) Mengembangkan akses pada pelayanan dasar lingkungan yang sesuai dengan system kota
- g) Meningkatkan perekonomian pada taraf lokal sebagai wadah untuk meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan
- h) Meningkatkan perekonomian pada tingkatan lokal sebagai wadah terhadap meningkatnya penghidupan yang berkelanjutan
- i) Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelakukunci; dan
- j) Mewadahi perubahan perilaku dan sikap terhadap pemangku kepentingan di dalam rangka untuk menjaga lingkungan permukiman untuk menjadi k dan berkelanjutan.



e. Prinsip Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Prinsip dasar yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan Program Kotaku ialah:

- a) Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin dan memantau kegiatan program penanganan terhadap permukiman yang kumuh secara bersama-sama dengan beberapa pemangku kepentingan dan juga melibatkan masyarakat serta kelompok yang peduli
- b) Perencanaan yang berorientasi pada hasil pencapaian tujuan-tujuan dan juga komprehensif. Penataan permukiman dilaksanakan dengan berdasarkan pada komprehensif dan berorientasi pada pencapaian tujuan permukiman yang layak huni berdasarkan pada visi kabupaten/kota yang memiliki peranan dalam pencapaian-pencapaian target yang ditentukan nasional, yaitu sampai 0 Ha lahan kumuh di dalam 5 tahun yang akan datang pada tahun 2019.
- c) Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kota/ kabupaten dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan

permukiman kumuh di tingkat kota/ kabupaten mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari



Pemerintah Provinsi, Pemkot/ Pemkab hingga pemerintah desa dan kecamatan.

- d) Pembangunan yang partisipatif adalah dengan memadukan perencanaan mulai dari sampai pada tingkatan atas, sehingga perencanaan program pada tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak dapat terelakkan terhadap perencanaan pada tingkat kota.
- e) Prinsip yang inovatif dan kreatif di dalam menangani permukiman yang kumuh ialah upaya yang menuntut pada pengembangan cara dan Ide yang baru dalam menghadapi atau menangani permasalahan dan peluang-peluang yang dibutuhkan di dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan secara bersama dan juga menyelenggarakan lingkungan permukiman yang layak untuk dijadikan tempat tinggal.
- f) Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan. Program penanganan yang bersifat investasi dari program KOTAKU harus ada prinsip-prinsip yang membangun secara berkelanjutan, oleh karenanya di dalam setiap proses perencanaan dan juga pelaksanaannya sangat penting untuk menerapkan prosedur dan juga prinsip tertentu yang merujuk terhadap Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program Kotaku.



Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*). Prinsip Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*). Membuat kegiatan

dari program penanganan permukiman yang kumuh sebagai alasan untuk mengembangkan kapabilitas dari pemerintah daerah, pemerintah kota/kabupaten dan juga masyarakat, agar dapat mengelola dan melaksanakan pembangunan wilayahnya secara mandiri dengan cara mengimplementasikan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik (*good governance*).

- h) Investasi di dalam program penanganan permukiman harus dapat mengembangkan daya dukung dan kapasitas lingkungan.

f. Cakupan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Program Kotaku terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya:

- 1) Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan;
- 2) Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;
- 3) Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari:
 - a) Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih.

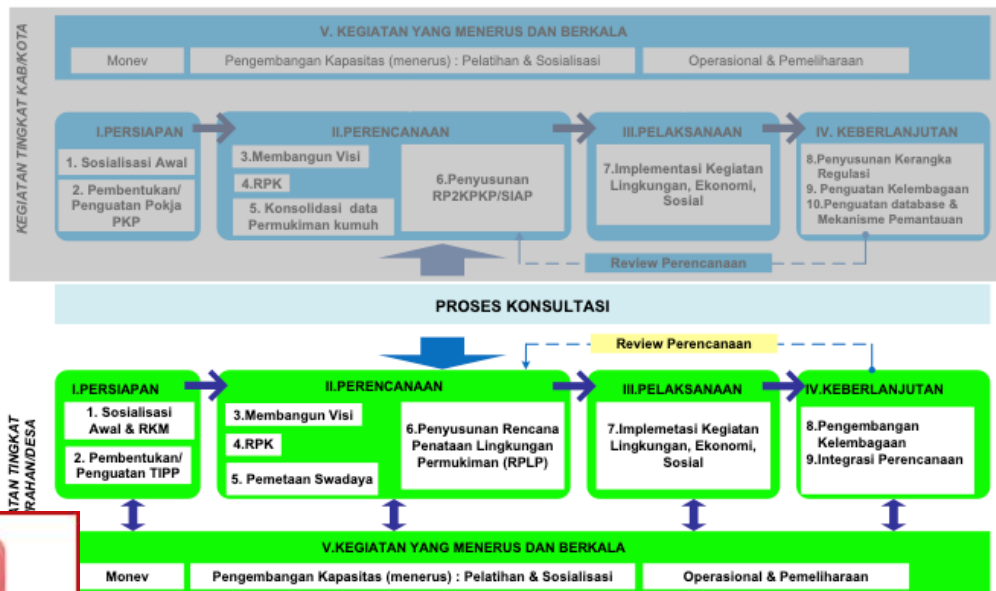
Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



- c) Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- 4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan
- 5) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana.

g. Tahapan Kegiatan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Tingkat Kelurahan/Desa

Program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan mempunyai tahapan siklus program yang sinergis dengan program perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta menjadi satu kesatuan dan sinkron dengan program tingkat kabupaten/kota yang dirajut melalui forum-forum konsultasi intensif.



gambar 2.2 Tahapan kegiatan program Kotaku tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Kelurahan/Desa

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa



Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan reguler.

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi Pemerintahkecamatan, pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam peyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa/Kelurahan dan Pembentukan/Penguatan TIPP. Tahapan sosialisasi awal program Kotaku dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program Kotaku. Tahapan yang kedua adalah dengan membentuk

ng merupakan tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan
man tingkat Kelurahan/Desa yang didalamnya terdiri dari beberapa



Pokja yang minimal sesuai dengan 7 (tujuh) indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kecamatan/Kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- a) Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di Kecamatan maupun diKelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif.
- b) Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa.
- c) Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMD Desa, yang terkait dengan program Kotaku.

2) Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (*livelihood*), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang

diinginkan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan
Kampanye Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data



baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah *livelihood*, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya. Adapun tahapan perencanaan secara umum dapat adalah sebagai berikut:

a) Membangun Visi

Visi permukiman yang dimaksud adalah upaya masyarakat dalam mendalami visi Pemerintah kabupaten/kota yang ada dalam RPJMD, khususnya yang terkait dengan visi pembangunan permukiman dan pelayanan infrastrukturnya. Membangun visi permukiman bisa dilakukan bila Pemerintah kabupaten/kota setuju bahwa visi tersebut sebagai pelengkap visi Kabupaten/kota yang telah terbangun. Namun bila tidak mendapat persetujuan, maka kegiatan selanjutnya dilakukan untuk menyempurnakan konten misi permukiman. Misi permukiman ini merupakan rumusan, gagasan

a-cita masyarakat terhadap kondisi permukiman layak huni dan jutan yang akan dicapai pada masa mendatang. Hal ini bertujuan agar



perencanaan yang dibuat oleh masyarakat lebih terarah dan masyarakat dapat menyusun strategi untuk mengurangi/perbedaan/jarak antara kondisi saat ini dengan visi & misi yang ingin dicapai.

b) Refleksi Perkara Kritis (RPK)

Berdasarkan hasil visi & misi Permukiman, kemudian dilaksanakan Refleksi Perkara Kritis (RPK) dengan tujuan menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat serta menggali akar penyebab, karakteristik terjadinya kumuh termasuk didalamnya merefleksikan tentang penghidupan masyarakat (livelihood), bencana yang pernah terjadi, kesetaraan dan keadilan masyarakat dalam pembangunan serta dampak-dampak sosial dan lingkungan yang pernah terjadi pada pembangunan permukiman sebelumnya. Disamping itu, kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan terhadap kondisi lingkungan permukiman di wilayahnya, bahwa masyarakat mampu memberikan solusi dan perbaikan terhadap kondisi lingkungan permukiman yang dapat yang dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap warga mampu berkontribusi (baik tenaga, waktu, pikiran, uang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) secara bersama-sama melakukan penataan permukiman. Pelaksanaan Tahapan kegiatan membangun visi & misi dan kegiatan Refleksi Perkara Kritis

dilakukan sesuai ketentuan di atas, namun untuk efektifitas waktu penyelenggaraan dengan melibatkan masyarakat, maka penyelenggaraan



tahap Visi & misi dan RPK dapat dilakukan dalam satu paket dan pada waktu bersamaan/parallel.

c) Pemetaan Swadaya (PS)

Pemetaan Swadaya (PS) adalah proses kajian dalam menemu kenali persoalan (lingkungan, sosial, ekonomi) dan potensi-potensi terhadap asset sumber daya manusia, alam, sosial, ekonomi serta infrastruktur serta kajian dalam memetakan akar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap kondisi riil/eksisting kawasan permukiman diwilayah Kelurahan/Desa.

Persoalan lingkungan mengacu pada tujuh kriteria kumuh yang mengacu pada Permen PU, yaitu mencakup (1) penataan bangunan, (2) jalan, (3) drainase, (4) air minum, (5) persampahan, (6) sanitasi, dan (7) proteksi kebakaran. Ketersediaan ruang terbuka hijau juga telah disepakati untuk masuk ke dalam kriteria kumuh dari aspek lingkungan ini. Persoalan sosial ekonomi mencakup persoalan terkait pentagonal asset, seperti sumber daya manusia, pendapatan, pemilikan asset, kegiatan ekonomi, serta persoalan-persoalan kerentanan sosial. Data baseline 100-0-100 dan profil permukiman kelurahan/desa merupakan data yang digunakan oleh TIPP sebagai data untuk mempertajam kegiatan Pemetaan Swadaya. Data/peta permukiman lainnya baik yang bersumber dari kelurahan/desa, kecamatan maupun

data dari kab/kota digunakan sebagai data pendukung untuk memastikan



perencanaan tingkat masyarakat (RPLP) terkonsolidasi dengan perencanaan tingkat kab/kota (RP2KPKP) secara lebih jelas.

Pemetaan Swadaya dilaksanakan oleh TIPP bersama masyarakat yang dilakukan ditingkat RT/RW/Dusun sampai penyepakatan terhadap kondisi masalah, potensi dan usulan/gagasan masyarakat dalam upaya mewujudkan visi dan misi masyarakat. Metode yang dilakukan dalam Pemetaan Swadaya ini dapat dilakukan dengan cara transek, wawancara, sensus, FGD, pemetaan dalam bentuk tematik-tematik serta rembung warga ditingkat kelurahan/desa dalam penyepakatan hasil kajian yang akan dijadikan bahan TIPP dalam menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Tahapan Pemetaan Swadaya (PS) terdiri dari persiapan pemetaan, pemetaan dan kajian gambaran umum kelurahan, pemetaan dan kajian profil permukiman/permukiman kumuh, pemetaan gambaran kondisi sosial dan ekonomi serta, pemetaan gambaran kondisi rawan bencana.

d) Tahap Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)

Adapun tahap pada penyusunan rencana penataan lingkungan adalah sebagai berikut:

- Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP dengan kedalaman rencana teknis) merupakan dokumen perencanaan

permukiman/permukiman kumuh kelurahan/desa yang disusun secara



partisipatif dengan mewujudkan keterpaduan/keselarasan perencanaan tingkat kelurahan/desa dan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota;

- RPLP merupakan dokumen rencana 5 (lima) tahun sebagai instrumen kolaborasi Kelurahan/Desa dalam penanganan permukiman kumuh yang disusun untuk mencapai 0 persen kumuh di kelurahan dan mencegah tumbuhnya kumuh baru;
- RPLP memuat perencanaan penanganan permukiman kumuh yang komprehensif, mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (*livelihood*) dan rencana penataan lingkungan permukiman secara spasial, yang terkonsolidasi dengan RP2KPKP maupun rencana peningkatan kualitas dan pencegahan permukiman kumuh tingkat kota maupun kelurahan lainnya;
- RPLP disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan dan dampak sosial, gender, kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan disabilitas), serta pengurangan resiko bencana;
- RPLP memuat rencana aksi keterpaduan program dari berbagai sumber pendanaan termasuk swadaya masyarakat, yang dibutuhkan untuk mendukung rencana penanganan tujuh aspek kumuh dan sosial ekonomi.

RPLP ini disusun oleh TIPP Bersama BKM/LKM yang didampingi oleh

Tim Fasilitator dan Tim Koordinator Kota (bila diperlukan). Hasil

ini dilanjutkan dengan penyusunan rencana teknis yang akan



dikaji/dibahas lebih mendalam oleh TIPP dilokasi prioritas deliniasi permukiman kumuh yang telah disepakati akan ditangani secara keterpaduan oleh berbagai sektor.

3) Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya APBN/Bantuan investasi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain-lain. Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a) Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus berkualitas sesuai dengan standar teknis dan berfungsi dengan baik. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- b) Kegiatan ekonomi terdiri dari peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara

telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK).



c) Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: i) pelatihan/*on the job training* kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; ii) sosialisasi menerus; iii) Pelatihan /*on the job training vocational*; pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; kegiatan pemasaran program permukiman dan; Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.

4) Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, pemda dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi:

- a) Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Kolaborasi Secara Menerus
- b) Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

h. Kelembagaan Pada Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

1) Lembaga Masyarakat yang Harus Dibangun Dalam Kotaku

ga yang sadar akan potensi dan persoalan yang masih harus
ikan tersebut, dapat mengorganisasi diri sebagai masyarakat warga



dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari masyarakat wargakelurahan yang bersangkutan, yang secara jenerik selanjutnya disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).

Pengertian masyarakat warga (*civil society*) adalah himpunan masyarakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya memenuhi kebutuhan atau memperjuangkan kepentingan, memecahkan persoalan atau menyatakan kepedulian bersama dengan tetap menghargai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, keluarga, agama dan usaha.

Dengan demikian, masyarakat warga yang dibangun dalam Kotaku adalah himpunan masyarakat yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, inklusif, demokratik, mandiri, otonom, proaktif, bersemangat saling membantu, menghargai kesatuan dalam keragaman dan kedamaian. BKM/LKM jelas merupakan lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil socitey*), yang dibangun

lola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (*value based*). Sebagai masyarakat bersinergi, BKM/LKM berbentuk pimpinan kolektif, dimana



keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM/LKM, dengan musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai lembaga kepercayaan (*'board of trusty'*), anggota-anggota BKM/LKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga, berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar.

2) Anggota BKM/LKM

Untuk memimpin masyarakat warga ini, dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Anggota pimpinan kolektif masyarakat warga ini yang kemudian disebut anggota BKM/LKM.

Anggota-anggota BKM/LKM tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin. Anggota-anggota BKM/LKM ini diberi kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberi, kontribusi peduli, berkorban, dan ikhlas berbuat nyata bagi warga miskin yang ada di wilayahnya. Adanya kesempatan dan kepercayaan itulah merupakan imbalan yang tak ternilai harganya, apalagi dibandingkan materi atau status, karena anggota-anggota BKM/LKM tersebut

berbuat baik terhadap sesama, khususnya kaum miskin dan marginal.



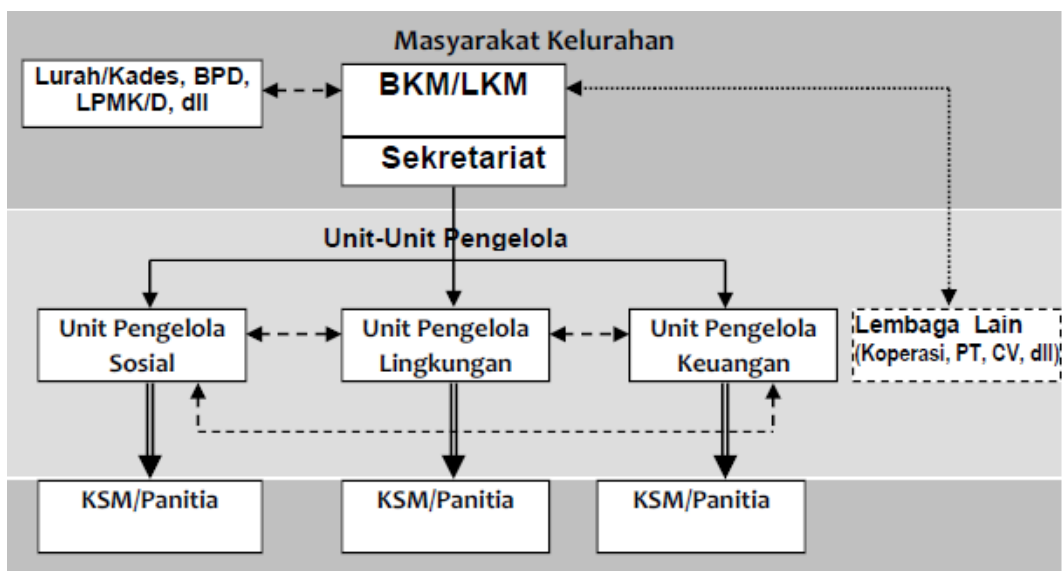
Anggota-anggota BKM/LKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat kemanusiaan atau track record perbuatan baik dan mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan serta secara tertulis dan rahasia. Utusan-utusan warga adalah warga pilihan masyarakat RT yang dipilih dengan mekanisme dan kriteria yang sama. Dalam hal ini, masyarakat warga RT mengadakan rembuk dan FGD Kepemimpinan moral untuk menuliskan 3-5 orang terbaik sebagai utusan warga yang akan menjadi pemilih pada pemilihan anggota BKM/LKM di tingkat kelurahan. Jumlah utusan warga pada pemilihan anggota BKM/LKM di tingkat kelurahan adalah 2% dari jumlah seluruh penduduk kelurahan. Bila jumlah RT melebihi 50 RT, maka setelah utusan RT terpilih dapat dilakukan lagi penyaringan di tingkat RW dengan pola seleksi yang sama, dengan tetap memperhitungkan bahwa jumlah warga yang berpartisipasi pada pemilihan anggota BKM/LKM di kelurahan tersebut mencapai minimal 30% dari jumlah penduduk kelurahan bersangkutan.

Masa pengabdian anggota BKM/LKM adalah 2 tahun dengan kemungkinan dapat dievaluasi pada setiap tahunnya berdasarkan indikator perbuatan baik serta kualitas sifat-sifat kemanusiaan. Pada bulan ke-23 atau satu bulan sebelum masa pengabdian anggota BKM/LKM berakhir,

di tingkat kelurahan melakukan proses pemilihan ulang dengan mekanisme yang sama. Anggota BKM/LKM yang tengah mengabdikan dan akan berakhir masa



tugasnya, secara otomatis berhak menjadi peserta pemilihan anggota BKM/LKM baru di tingkat kelurahan. Sehingga dalam hal ini masyarakat hanya memilih 2 utusan warga yang bukan menjadi anggota BKM/LKM saat itu. Utusan-utusan warga pilihan masyarakat ditambah dengan anggota BKM/LKM yang ada itulah yang akan menjadi peserta sekaligus memiliki hak memilih dan dipilih pada rapat pemilihan anggota BKM/LKM baru.



Gambar 2.3 Struktur BKM/LKM
 Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Program Kotaku Tingkat Kelurahan/Desa

D. Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dalam aspek-aspek tertentu. Penelitian ini memiliki

kelebihan atau keselarasan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian

tersebut. Di antara persamaan dan perbedaan tersebut dapat di lihat pada

hal-hal berikut:



Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terkait

Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
<p>Fitriza Yuliana, Septu Haswindy Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat</p> <p>(Jurnal Ilmu Lingkungan, 2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi permasalahan kota, apabila sampah tidak dilakukan pengelolaan dengan baik maka akan menimbulkan masalah. • Pengurangan efektif dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat sebagai sumber utama sampah. Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat melalui kegiatan pembangunan. 	<p>Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah pemukiman, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman serta untuk menganalisis hubungan karakteristik masyarakat dan lingkungan pemukiman dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman.</p>	<p>Metode deskriptif evaluatif. Teknik pengambilan data, yakni: wawancara, penelusuran pustaka dan pengamatan di lapangan</p>	<p>Variabel tidak bebas yaitu tingkat partisipasi masyarakat (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian). Sedangkan variabel Y merupakan variabel bebas yaitu (pendidikan, pendapatan, lama tinggal, luas halaman, keadaan lingkungan, persepsi masyarakat dan sikap terhadap lingkungan)</p>	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman di Kecamatan Tungkal Ilir adalah tingkat pendidikan, pendapatan, luas halaman, keadaan lingkungan, sikap terhadap lingkungan dan persepsi masyarakat. Sedangkan dari tingkat partisipasi, hasilnya dikategorikan rendah atau kurang yaitu sebesar 56,0%, sedang atau cukup sebesar 25,0% dan tinggi atau baik sebesar 19,0%. Dan untuk hasil analisis karakteristik masyarakat dan lingkungan pemukiman berhubungan positif sangat nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan untuk karakteristik masyarakat yang tidak memiliki hubungan dengan tingkat</p>



Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
<p>Sahria Apriliana</p> <p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Tentang Program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan)</p> <p>(eJournal Administrasi Negara,2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pelaksanaan pembangunan program Kotaku di Kelurahan Teritip yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat, berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya diinginkan, dimana partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. 	<p>Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam program pembangunan drainase dan sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan dan menghambat dalam pelaksanaan program kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam program pembangunan drainase dan sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan.</p>	<p>Deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data, yakni: wawancara, observasi dan dokumentasi</p>	<p>Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil d. Partisipasi masyarakat dalam tahapan evaluasi hasil pembangunan <p>2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)</p>	<p>partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pemukiman adalah lama tinggal.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam program Pembangunan Drainase dan Sanitasi di Kelurahan Teritip Kota Balikpapan sudah baik dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Namun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil belum maksimal juga dari segi faktor penghambat meliputi</p> <p>masih kurangnya kesadaran/kemauan masyarakat itu sendiri, kesibukan masyarakat terhadap pekerjaannya yang menjadikan ketidakhadiran masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, kurangnya kepercayaan masyarakat tentang</p>



Sumber	Latar Belakang	Tujuan	Metode	Variabel	Hasil
					penyelenggaraan program Kotaku, kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dipungkiri akan mengharapkan imbalan, kurang pahamnya masyarakat akan pembangunan yang baik dan kurang tanggapnya masyarakat terhadap masalah-masalah yang terjadi pada lingkungan sendiri, dan fasilitas yang kurang memadai.

